



WAKTU TEPAT ROTASI PEJABAT

BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 2





ENAM BULAN DILANTIK SAATNYA PEJABAT DIUTAK-ATIK

PERIODE kedua pemerintahan Sri Juniarsih dan Gamalis di Kabupaten Berau sudah berjalan enam bulan sejak dilantik pada 15 April 2025. Sesuai aturan, kepala daerah bisa mulai kembali melakukan rotasi pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Sejumlah Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di Kabupaten Berau saat ini juga belum memiliki pejabat definitif dan masih diisi pelaksana tugas.

Dinas Perikanan saat ini dijabat Asisten III

Setkariat Kabupaten Berau, Maulidiyah, sebagai pelaksana tugas. Lalu, Pelaksana Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diisi Rusnan Hefni. Kemudian, Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Berau diisi Staf Ahli Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia Setkab Berau, Jaka Siswanta.

Selain itu, sejumlah kepala OPD juga akan segera memasuki masa purna tugas. Mereka di antaranya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ilyas natsir; Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sri Eka Takariyati; Kepala DPPKB-P3A, Rabiatul Islamiyah; Kepala Dinas Sosial, Iswahyudi; serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Amiruddin.

Pada 2024, Pemkab Berau sebenarnya telah melakukan lelang jabatan terhadap Dinas Perikanan serta Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman. Setelah berkas dikurasi secara administrasi, ada 10 nama yang masuk untuk masuk ke tahap uji kelayakan untuk dua dinas tersebut.

Mereka yang lolos lelang Dinas Perikanan yakni Abdul Majid, Desmus Ersya, Dewi Rosita, Mansur Tanca, dan Hesben Nafsiah Nuransyah. Lalu, mereka yang lolos lelang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Ismiyanto, Riziah Awalya, Mulyadi, Dahry, dan Marsudi.

Dari 10 nama tersebut kemudian mengerucut ke tiga nama di masing-masing OPD. Tiga nama di Dinas Perikanan yakni Dewi Rosita, Desmus Ersya, dan Abdul Madjid. Sementara, di Disperkim yakni Ismiyanto, Mulyadi, dan Dahry.

Sayangnya, proses lelang jabatan tersebut harus ditunda lantaran bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, memastikan rotasi jabatan bakal digelar pada Oktober 2025 tanpa proses seleksi terbuka.

Kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Asisten II Setkab Berau dan Sekretaris DPRD Berau yang saat ini masih diisi pelaksana tugas.

BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 3



MUHAMMAD SAID

MUHAMMAD SAID

Kursi kosong itu akan diisi pejabat yang saat ini menjabat kepala dinas atau pegawai setara eselon II di lingkungan Pemkab Berau tanpa proses lelang.

“Untuk dua kursi itu tidak dilelang, hanya rotasi,” kata Said, September lalu.

Said menyebut, dari rotasi tersebut, terdapat dua kursi kepala dinas yang akan mengalami kekosongan karena mengemban amanat baru untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.

Belum diketahui siapa nama pejabat yang akan mengisi jabatan definitif Asisten II Setkab Berau dan Sekretaris DPRD Berau. Namun yang jelas, pada awal 2026, masih ada pejabat tinggi yang memasuki pensiun.

“Jadi akan ada 4 kursi kosong yang akan dilelang pada tahun depan,” tuturnya.

Terkait jabatan tinggi di Disperkim dan Dinas Perikanan, Said menegaskan tinggal menunggu masa pelantikan karena seleksi telah rampung digelar pada tahun lalu.

“Kalau itu sudah klir semua, tinggal menunggu dilantik, semoga bisa dilantik Oktober,” bebernya.

Mantan Kepala Bapenda Berau tersebut menjelaskan, saat ini pihaknya tinggal menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri untuk mengesahkan posisi baru para pejabat yang mendapatkan rotasi pegawai.

“Sekarang rotasi harus mendapat persetujuan sampai ke kementerian, tidak



SUMADI

lagi jadi kewenangan penuh dari kepala daerah,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, dan Informasi ASN BKPSDM Berau, Purwo Sutopo, menyebut, sebanyak 30 pejabat akan pensiun secara bertahap pada 2026, baik dari jabatan fungsional maupun struktural di hampir semua dinas.

Rinciannya, mulai Januari ada empat pejabat pensiun, lalu Februari empat orang, Maret satu orang, April satu orang, Mei empat orang, Juni dua orang, Juli tiga orang, Agustus tiga orang, September satu orang, Oktober dan November masing-masing tiga orang, serta Desember satu orang.

“Ini tidak bersamaan, namun sepanjang tahun pejabat tersebut sudah pensiun secara bergiliran,” bebernya.

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, meminta agar proses rotasi pejabat dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Ia menekankan, yang lebih utama saat ini adalah mengisi posisi jabatan kosong dengan orang yang benar-benar kompeten.

“Silakan semua dinas dievaluasi. Kinerja itu kan yang berwenang menilai adalah Baperjakat dan Bupati. Tapi menurut saya, lebih baik diutamakan dulu mengisi dinas yang kosong dengan orang yang kompeten agar roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien,” kata Sumadi kepada Berauterkini, Jumat (3/10/2025).

Sumadi juga menyinggung isu pemotongan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat sebesar kurang lebih 50 persen.

Menurutnya, kondisi ini menuntut Pemkab lebih selektif dalam menentukan pejabat yang mampu menjalankan program bupati dengan baik.

“Jadi, tempatkan mereka yang memang benar-benar punya kualifikasi dan kemampuan mengeksekusi program dan visi-misi kepala daerah,” paparnya.

Sejauh ini, kata dia, kepala OPD yang ditetapkan di periode sebelumnya sebenarnya sudah cukup baik. Meski ada beberapa yang jadi sorotan, hal ini juga perlu menjadi catatan kepala daerah.

“Masyarakat tetap berhak menilai kinerja para kepala OPD, apakah mereka sudah memenuhi harapan bupati atau belum,” jelasnya.

Ia menambahkan, bupati bersama timnya diyakini akan memilih pejabat yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Namun, ia juga mengingatkan, jika mutasi dilakukan di penghujung tahun, maka harus benar-benar dipertimbangkan agar tidak mengganggu penyelesaian program di tahun 2025.

“Apalagi tinggal sekitar dua bulan lagi tahun anggaran berakhir. Kalau mutasi dilakukan sekarang, khawatir mengganggu pelaporan, pencairan, dan program akhir tahun. Khusus dinas dengan anggaran besar, lebih baik dicari waktu yang tepat,” jelasnya.

Menurut Sumadi, tidak ada kewajiban bagi bupati untuk segera melakukan rotasi dalam waktu dekat. Yang terpenting, rotasi harus memberi dampak positif terhadap percepatan program pemerintah daerah, bukan justru memperlambat.

“Tidak perlu terburu-buru. Kalau mutasi bisa mempercepat program bupati dan menyelesaikan pekerjaan lama, silakan dilakukan. Tapi kalau berpotensi mengganggu, lebih baik tunggu saat yang tepat saja,” pungkasnya.

(SULAIMAN/HENDRA IRAWAN)

TIGA NAMA DENGAN NILAI ASESMEN TERTINGGI

JPTP DISPERKIM:

1. Ismiyanto
2. Mulyadi
3. Dahry

JPTP DINAS PERIKANAN:

1. Dewi Rosita
2. Desmus Ersya
3. Abdul Madjid





GEDUNG WALET

Pelayanan Rumah Sakit Terus Disorot Posisi Direktur Patut Dicapot

PELAYANAN kesehatan di RSUD dr Abdul Rivai mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat dalam beberapa waktu belakangan. Bahkan, DPRD Berau juga memberikan sejumlah evaluasi terhadap pelayanan di rumah sakit milik Pemkab Berau tersebut.

Beberapa waktu belakangan juga beredar kabar dewan pengawas mengusulkan penggantian Direktur RSUD dr Abdul Rivai kepada Bupati Berau.

Kepala Dinas Kesehatan Berau yang juga dewan pengawas RSUD dr Abdul Rivai, Lamlay Sarie, mengingatkan proses peremajaan manajemen merupakan kebijakan biasa dan lumrah dilakukan untuk memperbaiki kualitas manajemen di rumah sakit.

Peremajaan manajemen harus dilakukan demi memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam mengejar target pemerintah daerah.

"Tidak ada ya, tapi peremajaan itu memang penting," kata Lamlay saat ditemui Berauterkini, Rabu (1/10/2025).

Lamlay mengatakan, dalam manajemen yang masih kurang baik saat ini, perbaikan dapat dilakukan dalam masa satu tahun. Dengan komitmen tinggi pihak manajemen, seharusnya langkah tersebut bisa ditunaikan dengan baik.

"Kalau perbaikan di dinas mungkin tiga tahun. Tapi kalau di rumah sakit, satu tahun cukup," tuturnya.

Selain itu, diperlukan kecakapan manajemen dalam menerjemahkan seluruh aturan yang muncul di level pusat hingga daerah. Baik itu undang-undang kesehatan, aturan kementerian keuangan, hingga aturan turunan yang dapat berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati terkait kesehatan.

Pemahaman terhadap aturan tersebut



diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang diatur secara resmi.

"Jangan disalahartikan atau bahkan tidak tahu aturan terbaru, karena ini sektor yang paling disorot," ucap dia.

Pembenahan tata kelola manajemen RSUD dr Abdul Rivai menjadi agenda penting yang mesti ditunaikan mengingat banyak kebutuhan yang harus dibenahi dari dalam rumah sakit.

Direktur RSUD dr Abdul Rivai, Jusram, menegaskan, pihaknya setuju dengan wacana peremajaan atau penataan struktur ulang di dalam manajemen rumah sakit bila bertujuan untuk meningkatkan kinerja.

Menurutnya, penyegaran itu dibutuhkan demi menciptakan situasi internal yang baik dan tak terkesan monoton atau lebih dinamis dalam menjalankan tugas.

Namun, dia tak sepakat dengan komentar terkait pembenahan rumah sakit hanya membutuhkan waktu setahun. Sebab, ketika melihat sengkabut masalah di dalam rumah sakit, pihak yang memberikan kritik baru akan paham terkait masalah yang sukar diselesaikan.

"Setahun itu belum tentu (selesai), ini tidak mudah diselesaikan. Beliau pernah jadi kabid di rumah sakit dan tahu bagaimana kompleksnya masalah di rumah sakit," kata Jusram, Kamis (10/2/2025).

Untuk mengatasi keluhan pengunjung, Jusram mengaku pihaknya sudah

menyiapkan hingga tiga aplikasi yang dapat difungsikan untuk melaporkan keluhan dalam pelayanan.

Aplikasi itu mulai dari program lawas seperti Sapa Aku dan Bakissa. Lalu, ada program SiLinda yang baru-baru ini difungsikan dan memiliki meja khusus di dekat ruang lobi rumah sakit.

"Semua aplikasi itu terkoneksi dengan pimpinan," terangnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniar-sih, mengaku tak ingin berkomentar banyak soal rumor pemilihan direktur baru di rumah sakit plat merah tersebut. Dia tak ingin mengambil langkah gegabah dalam merotasi struktur pimpinan di RSUD dr Abdul Rivai.

"Belum saatnya kita bahas soal itu," tegas Sri Juniar-sih, Jumat (3/10/2025).

Daripada membahas kabar peremajaan manajemen rumah sakit, Sri Juniar-sih mengaku lebih mengedepankan agar semua lini manajemen rumah sakit aktif bekerja lebih profesional ke depan.

"Kami ingin mendorong dulu semua pihak bekerja secara profesional," ucapnya.

Saat ini, langkah terpenting adalah memastikan komunikasi dan koordinasi lintas sektor berjalan sesuai dengan aturan, baik antara manajemen, dewan pengawas, hingga masyarakat.

"Wajib berkoordinasi dengan Dewas, jangan tertutup atas evaluasi yang dibutuhkan," ujarnya. (SULAIMAN)



GEROBOOKS dan Harapan Tingkatkan Minat Literasi Generasi Muda di Berau

DI tengah gempuran gawai dan media sosial yang mendominasi keseharian anak muda, masih ada sekelompok orang yang berupaya menghidupkan semangat membaca dengan cara berbeda. Namanya Gerobooks, komunitas penggerak literasi yang berdiri sejak 14 Februari 2021.

Gerobooks lahir dari keresahan sang pendiri, Risna Herjayanti, melihat rendahnya minat baca generasi muda Berau. Minimnya wadah literasi yang menyenangkan juga membuat kegiatan membaca terasa kaku dan jauh dari gaya hidup anak muda.

"Dari situlah ide gerobak buku terconter, sebuah konsep sederhana tapi penuh makna. Kami ingin membaca itu tidak hanya di ruang-ruang formal, tapi bisa di mana saja. Karena itu, gerobak buku kami

berpindah-pindah tempat," ujar Risna.

Nama Gerobooks sendiri merupakan gabungan kata Gerobak dan Books. Konsep ini memungkinkan kegiatan membaca dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari kafe, ruang komunitas, hingga taman kota. Seperti di Tumbuh Space, Story Mount, POUR Cafe, bahkan Taman Cendana.

Agar membaca terasa menyenangkan, Gerobooks tidak hanya menyajikan buku. Mereka mengemasnya lewat berbagai acara, seperti Book Party, BookTalks, Nulis Bareng (Online), Barter Buku, hingga Art Market.

Anak muda yang biasanya sibuk berselancar di smartphone ketika nongkrong, kini bisa menemukan aktivitas alternatif membaca buku sambil berdiskusi atau bahkan bertemu seniman lokal.

"Target kita bukan hanya anak muda, Gerobooks juga menjangkau berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa," jelasnya.

Bahkan, komunitas ini peduli pada kelompok difabel. Mereka berkolaborasi dengan Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten Berau dalam kegiatan belajar bahasa isyarat.

"Oktober mendatang, Gerobooks bersama SLB Negeri Tanjung Redeb dan sekolah inklusif di Berau akan menggelar kegiatan "Merayakan Kita", berupa workshop dan pameran seni inklusi," tutur wanita berkacamata tersebut.

Buku-buku yang digunakan Gerobooks sebagian merupakan koleksi pribadi. Namun, dukungan luar biasa juga datang dari berbagai pihak.

"Tahun 2025, mereka menerima hibah 1.000 Bahan Bacaan Bermutu dari Perpustakaan Nasional RI, serta sumbangan buku dari Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi

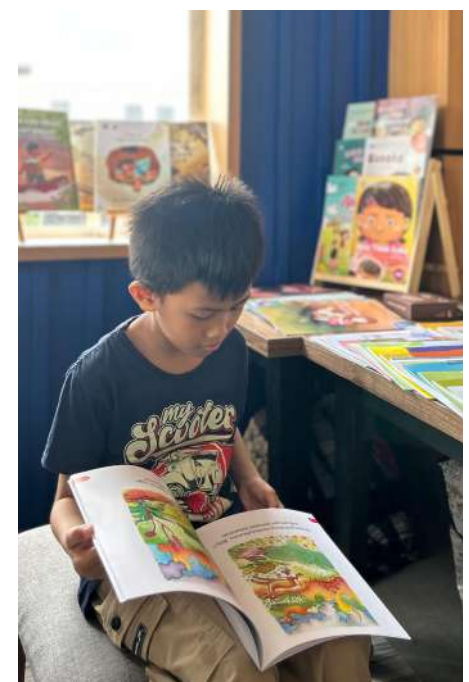
X DPR RI," tambahnya.

Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berau turut memberi fasilitas untuk mendukung kegiatan mereka.

Dukungan inilah yang membuat Gerobooks mampu terus berjalan, meski tantangan pendanaan dan manajemen masih menjadi hambatan utama.

Target jangka panjang mereka pun tak kalah menarik menerbitkan buku cerita anak bergambar yang mengangkat kearifan lokal Berau, lalu menyebarkannya ke sekolah-sekolah mulai dari TK hingga SMA.

"Semoga Gerobooks bisa terus berkontribusi dalam pendidikan dan literasi inklusif. Kami ingin literasi bisa dinikmati semua kalangan, termasuk anak berkebutuhan khusus," kata Risna. **(DINI DIVA APRILIA)**





Pantau Langsung Serapan Anggaran MBG

KANTOR Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb melaksanakan kegiatan survei lapangan ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Berau, Selasa (30/9/2025).

Dua SPPG yang disambangi oleh Kepala KPPN Tanjung Redeb adalah SPPG Karang Ambun dan SPPG Gunung Panjang.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang hingga saat ini dinilai masih rendah.

Kepala KPPN Tanjung Redeb, Viera Martina Rachmawati menjelaskan bahwa survei ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung di lapangan mengenai pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) serta berbagai kendala yang dihadapi oleh SPPG di daerah.

"Survei ini menjadi penting untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan, terutama setelah munculnya pemberitaan tentang rendahnya penyerapan anggaran BGN," ujar Viera Martina Rachmawati saat dihubungi pada Rabu (1/10/2025).

"Kami ingin mengetahui secara langsung apa saja hambatan yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan program ini,"

Dalam pelaksanaan survei, turut hadir Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung Redeb, Surtini, yang melakukan wawancara menda-

lam dengan para pengelola program di dua lokasi berbeda.

Di SPPG Gunung Panjang, Surtini mewawancarai akuntan serta ahli gizi guna menggali informasi mengenai proses pelaporan keuangan, penyaluran bantuan, serta efektivitas program MBG dari aspek teknis dan nutrisi.

Sementara itu, di SPPG Karang Ambun, Surtini berdiskusi langsung dengan kepala satuan pelayanan untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi dalam implementasi program.

Salah satu isu yang mengemuka adalah keterbatasan anggaran yang dirasakan oleh satuan pelayanan, sehingga berdampak pada cakupan dan kualitas layanan gizi yang diberikan kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Viera bilang, pihak KPPN Tanjung Redeb mengonfirmasi bahwa laporan terkait kekurangan anggaran untuk Program MBG telah diteruskan ke Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

Diharapkan, laporan tersebut menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang dapat

memperkuat dukungan pendanaan terhadap program-program pemenuhan gizi di daerah.

"Kami sudah menyampaikan laporan mengenai keterbatasan budget yang dialami beberapa SPPG ke Kantor Pusat. Harapannya, alokasi anggaran MBG dapat ditingkatkan agar program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan," tambah Viera.

Viera juga menuturkan bahwa kegiatan survei ini menjadi bagian dari upaya KPPN Tanjung Redeb dalam memperkuat sinergi antara instansi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program nasional.

Menurutnya, dengan mendapatkan data dan informasi langsung dari dua SPPG yang ada di Berau, pemerintah daerah mampu melakukan evaluasi menyeluruh sehingga program bisa berjalan lebih baik lagi. (NADYA ZAHIRA)





Berau Zona Merah Peredaran Narkoba

PEREDARAN narkoba di wilayah Kabupaten Berau sudah berada di level darurat. Dalam kurun 4 bulan terakhir tahun ini, Polres Berau sudah mengungkap 43 kasus peredaran narkoba dan menangkap 54 tersangka dengan jumlah barang bukti sabu lebih 3,7 kilogram.

"Kami anggap situasi ini sudah merah. Dari waktu ke waktu, ada peningkatan, baik peningkatan pengungkapan yang kami lakukan maupun peningkatan peredarannya," ungkap Kasat Resnarkoba Polres Berau, AKP Agus Priyanto, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, hampir seluruh polsek di wilayah hukum Polres Berau sudah menangani kasus narkoba.

Hal ini menunjukkan, peredaran barang haram tersebut sudah menyebar merata hingga ke tingkat kecamatan dan kampung, meski dari pengungkapan di lapangan memiliki level berbeda.

Ada yang hanya pengguna, ada juga yang pengedar, tapi mayoritas polisi di semua Polsek sudah pernah menangani kasus narkoba. Artinya, setiap kecamatan ada kasus narkoba.

Dari hasil pengungkapan, Kecamatan Tanjung Redeb masih menjadi wilayah dengan kasus peredaran narkoba tertinggi di Bumi Batiakkal.

Menurut Agus, aturan hukum sebenarnya sudah cukup tegas. Namun, sebagian pelaku justru kembali mengulang perbuatannya meski baru saja bebas.

"Kalau bicara ketegasan hukum, menurut saya undang-undang sudah luar biasa. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ada yang baru bebas beberapa bulan, sudah mengulangi lagi. Jadi, banyak faktor yang memengaruhi," ujarnya.

Salah satu faktor terbesar yang mem-

buat residivis kembali melakukan perbuatannya adalah faktor ekonomi.

"Kenapa ekonomi sangat berpengaruh? Karena keuntungan yang didapat memang besar. Tapi, keuntungan itu sebanding dengan risiko yang harus mereka tanggung," tambahnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, kata dia, peredaran narkoba di Berau sudah tidak mengenal batas kalangan.

Hampir semua lapisan masyarakat terlibat, mulai dari pekerja bangunan, pekerja perkebunan, guru, hingga pelajar.

"Sekarang tidak bisa lagi bilang sabu hanya dikonsumsi kalangan tertentu. Semua lapisan bisa terpengaruh, kecuali balita. Inilah yang membuat kami katakan Indonesia darurat narkoba," tegasnya.

Pada Kamis (2/10/2025), Satuan Reserse Narkoba Polres Berau memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 2.381,47 gram. Barang bukti senilai miliaran rupiah tersebut merupakan hasil pengungkapan dalam rentang waktu Juli hingga Agustus 2025.

Adapun jumlah tersangka sebanyak 44 orang, di mana 3 di antaranya adalah perempuan.

Wakapolres Berau, Kopol Donny Dwija, menyatakan, pemusnahan ini menjadi bukti keseriusan Polres Berau dalam memberantas jaringan narkotika.

"Jumlah sabu yang dimusnahkan hari ini cukup besar. Jika berhasil beredar akan memberikan ancaman serius bagi generasi Berau ke depan," kata Donny.

Pemusnahan dilakukan dengan cara mencampurkan sabu ke dalam wadah berisi air, kemudian dilarutkan dengan cairan detergen khusus. Cara ini memastikan barang bukti benar-benar hancur dan tidak bisa disalahgunakan kembali.

Agus Priyanto menambahkan, 44 ter-



sangka yang ditangkap berasal dari berbagai wilayah. Mereka pun memiliki peran berbeda, mulai dari kurir, pengedar, hingga perantara.

"Rata-rata modusnya masih sama, memanfaatkan jasa pengiriman dan transaksi tertutup. Namun, berkat kerja sama dengan masyarakat, kami berhasil membongkar jaringan tersebut," jelasnya.

Pemusnahan barang bukti ini tak hanya disaksikan oleh tersangka selaku pemilik. Tapi juga perwakilan Kejaksaan Negeri Berau, BNNK Berau, perwakilan Pengadilan Negeri, dan kuasa hukum tersangka. Langkah ini dilakukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

"Seluruh tersangka dikenakan pasal 112 dan 114 Nomor 35 tentang Narkotika," tegasnya.

Polres Berau juga mengimbau masyarakat agar terus waspada dan melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait narkoba.

"Kami butuh dukungan semua pihak untuk mengungkap kasus ini. Tak ada ampun bagi pelaku peredaran narkoba di Berau," pungkasnya. **(HENDRA IRAWAN)**



Kemah Bahagia di Berau Bersama MARRANG CAMPING

BERAWAL dari hobi yang sama, sekelompok anak muda di Berau membentuk komunitas kecil bernama Marrang Camping. Komunitas ini berdiri pada 17 Agustus 2022, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI.

Muhammad Amsal atau yang akrab disapa lam, salah satu penggagas Marrang Camping menjelaskan, Marrang sendiri berasal dari bahasa Berau atau Banua yang artinya senang atau bahagia.

Sedangkan camping dari bahasa Inggris artinya berkemah. Filosofinya, tiap kali camping kita harus senang dan bersenang-senang.

Marrang Camping lahir secara spontan saat saya bersama tiga rekan, Roby, Arif, dan Yusri melakukan kegiatan berkemah di Air Terjun Tambalang. Dari situlah muncul ide untuk membentuk wadah yang bisa menyalurkan hobi sekaligus memperkenalkan wisata alam di Kabupaten Berau,

"Awalnya ada sekitar 6 sampai 7 orang. Tapi sebenarnya Marrang

Camping ini terbuka untuk siapa saja. Jadi tidak ada anggota pasti, siapapun yang ikut camping bersama kami otomatis menjadi bagian dari Marrang Camping," jelas lam.

Adapun kegiatan yang rutin dilakukan antara lain camping di lokasi wisata, ikut serta dalam kegiatan bakti sosial, berkolaborasi dengan komunitas lain, hingga mempromosikan destinasi wisata Berau melalui media sosial resmi mereka, @marrang.camping.

Tujuan utama Marrang Camping sederhana, yakni menjadi wadah bagi pecinta camping sekaligus cara mereka memperkenalkan potensi wisata alam Berau.

Harapannya, komunitas ini bisa tetap konsisten, bahkan mendorong adanya camping ground yang mudah diakses masyarakat luas.

"Target kami, selain mengenalkan wisata, juga ingin tempat-tempat yang sudah kami kunjungi bisa tetap terjaga kelestariannya bagi siapapun yang datang," tutupnya. (DINI DIVA APRILIA)



Berau Terkini
tak berhenti

DIREKSI

Komisaris : M. Syaifuddin Zuhrie
Direktur : Rengkuh Enggalingtyaz, **Digital Marketing Manager** : Aidil Anugrah, **Ikltan** : Siti Nur Ariska, **Admin** : Tariska Ramadayani

Advokat & Konsultan Hukum : Firma Hukum H.A.M & Partner

Email Redaksi : berauterkini2023@gmail.com, **Ikltan dan informasi** : berauterkini2023@gmail.com
Alamat Redaksi : Ruko Komplek Perumahan Berau Indah, **Telepon** : 0851-6366-0045

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi : Robithoh Johan Palupi,
Koordinator Liputan : Rusdiyono, **Editor** : Maulana Ilhami Fawdi, **Reporter** : Sulaiman, Hendra Irawan, Dini Diva, Nadya Zahira, **Grasis** : Surya Adji Permana,
Media Sosial : Siti Nur Ariska, **IT & Web Development** : Fathurrohman.